

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN BUPATI NO 16 TAHUN**  
**2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DALAM**  
**GABUNGAN KELOMPOK TANI DI DESA LICIN KECAMATAN**  
**CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG**

DISUSUN OLEH:

NAMA : AGUNG ADI SAPUTRA

NPM : E.1835223190

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Skripsi dan Komprehensif Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang



**SEBELAS APRIL**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI**

**SEBELAS APRIL SUMEDANG**

**2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN BUPATI NO 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DALAM GABUNGAN KELOMPOK TANI DI DESA LICIN KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG”** ini, sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, Agustus 2021  
Yang membuat pernyataan,

AGUNG ADI SAPUTRA

**STIA**  
**SEBELAS APRIL**  
**SUMEDANG**

## **ABSTRAK**

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN BUPATI NO 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DALAM GABUNGAN KELOMPOK TANI DI DESA LICIN KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG**

AGUNG ADI SAPUTRA

E.1835223190

16 halaman depan, 5 bab, 154 halaman, 45 tabel, 7 gambar, daftar pustaka 22 buku, 2 dokumen, 8 daftar lampiran

Tujuan penelitian ini antara lain adalah: Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah Implementasi Program Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Dengan informan penelitian ketua, sekretaris, bendahara, seksi produksi, seksi usaha. Adapun Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumen. Sedangkan Prosedur Pengolahan Data dalam penelitian ini, yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, *Data Conclusion Drawing/Verification*, dan *Triangulasi*.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi sosial politik Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang: isi kebijakan, informasi, dukungan, pembagian potensi . Upaya untuk mengatasi masalah Implementasi Program Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang : isi kebijakan, informasi, dukungan, pembagian potensi.

Berkaitan dengan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran bagi Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang terhadap sumber daya, seperti sarana dan prasarana untuk memudahkan berbagai kegiatan pekerjaan yang terkait langsung dalam Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Merekomendasikan adanya peningkatan ukuran dan tujuan seperti lebih meningkatkan monitoring yang dilakukan oleh ketua serta lebih meningkatkan rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh anggota.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Implementasi Program



## KATA PENGANTAR

*Assalaamualaikum, Wr. Wb*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya kepada kita sekalian, dengan Ridho-Nya Syukur Alhamdulillah akhirnya peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN BUPATI NO 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DALAM GABUNGAN KELOMPOK TANI DIDESA LICIN KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG”**.

Pada penyusunan proposal skripsi ini penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Yth. Bapak H.Yuyun Hidayat, Drs. selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, M.Pd. selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
5. Yth. Ibu Irma Hermayanty, S.SPd., M.Si. selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
6. Yth. Bapak Suherman, Drs., M.Si selaku Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Yth. Bapak Edi Setiawan, S.Sos., M.Si. Selaku pembimbing II.
8. Yth. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
9. Yth. Seluruh Staf Tata Usaha Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.

10. Yth. Bapak Drs. Adang. Selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten yang telah memberikan ijin dan memberikan bantuan kepada peneliti selama melakukan observasi untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
11. Yth. Seluruh Pengurus Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
12. Yth. Kepada Kepala Kantor Dinas Pertanian Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang
13. Orang Tua dan Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungannya baik berupa moril maupun materil.
14. Orang-orang terdekat peneliti, sahabat karib yang selalu memberikan dukungan.
15. Semua Rekan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.

Memang tidak ada hasil yang paling sempurna akan tetapi selalu ada hasil yang lebih baik namun niat dan usaha adalah hal yang utama.

Semoga segala bimbingan, bantuan, nasehat dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin.

*Billahifisabililhaq Fastabiqul khairat,  
Wassalaamualaikum Wr.Wb.*

Sumedang, Agustus 2021

Agung Adi Saputra  
Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman

**LEMBAR JUDUL**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iii**

**DAFTAR TABEL..... vii**

**DAFTAR GAMBAR..... x**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... xi**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Penelitian ..... 1
- B. Fokus Permasalahan..... 8
- C. Tujuan Penelitian ..... 9
- D. Kegunaan Penelitian ..... 10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Hakekat Administrasi Negara ..... 11
  - 1. Ruang Lingkup Administrasi Negara ..... 12
- B. Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No. 16 Tahun 2006  
Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Gabungan  
Kelompok Tani Sebagai Bagian Dari Kajian Administrasi  
Negara..... 15
  - 1. Pengertian Kebijakan ..... 17
  - 2. Kebijakan Publik..... 19
  - 3. Proses Pembuatan Kebijakan ..... 20
- C. Implementasi ..... 22
  - 1. Pengertian Implementasi..... 22
  - 2. Alur Implementasi Kebijakan ..... 29
  - 3. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan ..... 31

4. Syarat-Syarat Implementasi Kebijakan.....	33
5. Implementasi Program Gabungan Kelompok Tani .....	33
6. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi .....	35
7. Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi .....	36
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	37
E. Kerangka Penelitian Dan Kisi-Kisi Intrumen Penelitian.....	39
1. Kerangka Pemikiran.....	39
2. Kisi-Kisi Pertanyaan Penelitian .....	42

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Desain Penelitian .....	44
B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian.....	47
1. Penentuan Sasaran .....	47
2. Informan Penelitian.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data .....	49
D. Prosedur Pengelolaan Data .....	52
E. Lokasi Dan Jadwal Penelitian.....	54

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang .....	55
1. Tugas Pokok dan Fungsi Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.....	57
2. Visi Misi Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang .....	58
3. Tujuan Dan Sasaran Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang .....	60
B. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang .....	61
C. Keadaan Anggota Gabungan Kelompok Tani Desa Licin	

Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.....	64
D. Kondisi Sarana Dan Prasarana Gabungan Kelompok Tani	
Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.....	66
E. Implementasi Di Gabungan Kelompok Tani Desa Licin	
Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.....	68
1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan .....	68
2. Sumber Daya.....	74
3. Karakteristik Agen Pelaksana .....	79
4. Sikap Dan Kecenderungan Para Pelaksana.....	84
5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana.....	89
6. Lingkungan Ekonomi Sosial Politik.....	95
F. Faktor-Faktor Penghambat Impementasi Kebijakan.....	103
1. Isi Kebijakan .....	103
2. Informasi .....	108
3. Dukungan.....	112
4. Pembagian Potensi .....	116
G. Upaya-Upaya Untuk Memperkuat Implementasi Kebijakan.....	120
1. Isi kebijakan .....	120
2. Informasi .....	124
3. Dukungan.....	127
4. Pembagian potensi .....	130
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	138
B. Saran.....	140

**DAFTAR PUSTAKA** .....56

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Nomor halaman	Judul	Tabel
Tabel 1.1	Keadaan Anggota Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	4
Tabel 1.2	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang .....	5
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 2.2.	Tabel Instrumen Penelitian .....	42
Tabel 3.1	Jumlah pengurus Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang .....	48
Tabel 3.2	Informan Penelitian.....	49
Tabel 3.3	Jadwal Penelitian.....	54
Tabel 4.1	Keadaan Anggota Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	65
Tabel 4.2	Keadaan Anggota Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Berdasarkan Usia.....	65
Tabel 4.3	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka kabupaten Sumedang .....	67
Tabel 4.4	Hasil Wawancara Tentang Ukuran .....	69
Tabel 4.5	Triangulasi Data Tentang Ukuran.....	71
Tabel 4.6	Hasil Wawancara Tentang Tujuan .....	72
Tabel 4.7	Triangulasi Data Tentang Tujuan.....	73
Tabel 4.8	Hasil Wawancara Tentang Jenis Sumber Daya Yang Dimiliki .....	75
Tabel 4.9	Triangulasi Data Tentang Sumber Daya Yang Dimiliki.....	76
Tabel 4.10	Hasil Wawancara Tentang Kemampuan Sumber Daya .....	78
Tabel 4.11	Triangulasi Data Tentang Kemampuan Sumber Daya.....	79
Tabel 4.12	Hasil Wawancara Tentang Struktur Organisasi .....	80
Tabel 4.13	Triangulasi Data Tentang Struktur Organisasi.....	81
Tabel 4.14	Hasil Wawancara Tentang Peran Organisasi Informal Yang Terlibat .....	82
Tabel 4.15	Triangulasi Data Tentang Peran Organisasi Informal Yang Terlibat .....	83
Tabel 4.16	Hasil Wawancara Respon Agen Pelaksana dan Masyarakat .....	85
Tabel 4.17	Triangulasi Data Tentang Respon Agen Pelaksana dan Masyarakat.....	86
Tabel 4.18	Hasil Wawancara Tentang Sosialisasi Tujuan Yang Jelas Kepada Masyarakat .....	88

Tabel 4.19	Triangulasi Data Sosialisasi Tujuan Yang Jelas Kepada Masyarakat.....	89
Tabel 4.20	Hasil Wawancara Tentang koordinasi antar pihak yang terlibat.....	90
Tabel 4.21	Triangulasi Data Tentang Tentang koordinasi antar pihak yang terlibat.....	91
Tabel 4.22	Hasil Wawancara Tentang Adanya Komunikasi Antar Pihak Yang Terlibat Dengan Masyarakat .....	93
Tabel 4.23	Triangulasi Data Tentang Tentang Adanya Komunikasi Antar Pihak Yang Terlibat Dengan Masyarakat .....	94
Tabel 4.24	Hasil Wawancara Tentang Dukungan Lingkungan Ekonomi.....	95
Tabel 4.25	Triangulasi Data Tentang Dukungan Lingkungan Ekonomi .....	96
Tabel 4.26	Hasil Wawancara Tentang Dukungan Lingkungan Sosial.....	97
Tabel 4.27	Triangulasi Data Tentang Dukungan Lingkungan Sosial .....	98
Tabel 4.28	Hasil Wawancara Tentang Dukungan Lingkungan Politik.....	99
Tabel 4.29	Triangulasi Data Tentang Dukungan Lingkungan Politik .....	100
Tabel 4.30	Ekapitulasi Hasil Wawancara Mengenai Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang .....	101
Tabel 4.31	Hasil Wawancara Tentang Pemahaman Isi Kebijakan .....	104
Tabel 4.32	Triangulasi Data Tentang Pemahaman Isi Kebijakan.....	105
Tabel 4.33	Hasil Wawancara Tentang Maksud Dan Tujuan.....	106
Tabel 4.34	Triangulasi Data Tentang Maksud Dan Tujuan .....	107
Tabel 4.35	Hasil Wawancara Tentang Ketidakjelasan Informasi .....	108
Tabel 4.36	Triangulasi Data Tentang Ketidakjelasan Informasi.....	109
Tabel 4.37	Hasil Wawancara Tentang Fasilitas .....	110
Tabel 4.38	Triangulasi Data Tentang Fasilitas.....	111
Tabel 4.39	Hasil Wawancara Tentang Kurangnya Dukungan Dari Pelaksana Kebijakan .....	112
Tabel 4.40	Triangulasi Data Tentang Kurangnya Dukungan Dari Pelaksana Kebijakan .....	113
Tabel 4.41	Hasil Wawancara Tentang Sarana Prasarana Yang Belum Memadai.....	114
Tabel 4.42	Triangulasi Data Tentang Sarana Prasarana Yang Belum Memadai.....	115
Tabel 4.43	Hasil Wawancara Tentang Adanya Pembagian Tugas Yang Belum Jelas .....	116
Tabel 4.44	Triangulasi Data Tentang Adanya Pembagian Tugas Yang Belum Jelas .....	117
Tabel 4.45	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.....	118
Tabel 4.46	Hasil Wawancara Tentang Pemahaman Isi Kebijakan .....	121

Tabel 4.47	Triangulasi Data Tentang Pemahaman Isi Kebijakan .....	122
Tabel 4.48	Hasil Wawancara Tentang Ketidakjelasan Maksud Dan Tujuan .....	123
Tabel 4.49	Triangulasi Data Tentang Ketidakjelasan Maksud Dan Tujuan .....	124
Tabel 4.50	Hasil Wawancara Tentang Ketidakjelasan Informasi .....	125
Tabel 4.51	Triangulasi Data Tentang Ketidakjelasan Informasi.....	126
Tabel 4.52	Hasil Wawancara Tentang Kurangnya Dukungan Dari Pelaksana Kebijakan .....	127
Tabel 4.53	Triangulasi Data Tentang Kurangnya Dukungan Dari Pelaksana Kebijakan .....	128
Tabel 4.54	Hasil Wawancara Tentang Sarana Dan Prasarana Yang Belum Memadai.....	129
Tabel 4.55	Triangulasi Data Tentang Sarana Dan Prasarana Yang Belum Memaadai.....	130
Tabel 4.56	Hasil Wawancara Tentang Adanya Pembagian Tugas Yang Belum Jelas .....	131
Tabel 4.57	Triangulasi Data Tentang Adanya Pembagian Tugas Yang Belum Jelas .....	132
Tabel 4.58	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Upaya-Upaya Untuk Memperkuat Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.....	133



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang .....	3
Gambar 2.1	Alur Implementasi Kebijakan .....	29
Gambar 2.2	Alur Implementasi Kebijakan .....	30
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran Analisis Implementasi Program Gabungan Keompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang .....	41
Gambar 3.1	Desain Penelitian.....	46
Gambar 3.2	Analisa Data Triangulasi.....	52
Gambar 3.3	Analisa Data Model Miles dan Huberman.....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Ketua STIA Sebelas April Sumedang Nomor : 0043/SK/D-STIA/K/IV/2020 Tentang Penetapan Mahasiswa Penyusun Judul Proposal Dan Dosen Pembimbing Skripsi Tahap Akademik 2020/2021 Gelombang II
2. Surat izin penelitian.
3. Pedoman Wawancara
4. Pedoman Observasi
5. Pedoman Dokumentasi
6. Dokumentasi Penelitian
7. Berita Acara Bimbingan.
8. Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Kecamatan Cimalaka memiliki luas wilayah sebesar 294 hektar dan memiliki jumlah desa sebanyak 12 desa. Untuk memenuhi kehidupannya sebagian besar masyarakat kecamatan Cimalaka memiliki mata pencaharian sebagai petani. Cara pemenuhan kebutuhan hidup tersebut sudah ada sejak jaman dahulu seperti meramu dan berburu kemudian berubah menjadi bercocok tanam salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pertanian. Kecamatan Cimalaka menerapkan kebijakan Gabungan Kelompok Tani di seluruh Desa yang ada di Kecamatan Cimalaka yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi melalui sektor pertanian diantaranya sektor pertanian tanaman pangan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor peternakan dan sektor perikanan.

Sektor pertanian berperan besar dalam perekonomian masyarakat desa Licin, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara melakukan peningkatan kontribusi sektor pertanian berdasarkan keunggulan wilayah melalui penetapan subsektor unggulan pada sektor pertanian harus disesuaikan berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang di miliki daerah. Subsektor unggulan adalah subsektor yang memiliki produktivitas yang tinggi dan dapat memberikan nilai tambah, sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa licin, karena besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian yang mencapai 30%

terhadap *Produk Domestic Bruto* (PDRB) namun dilihat dari penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 50%.

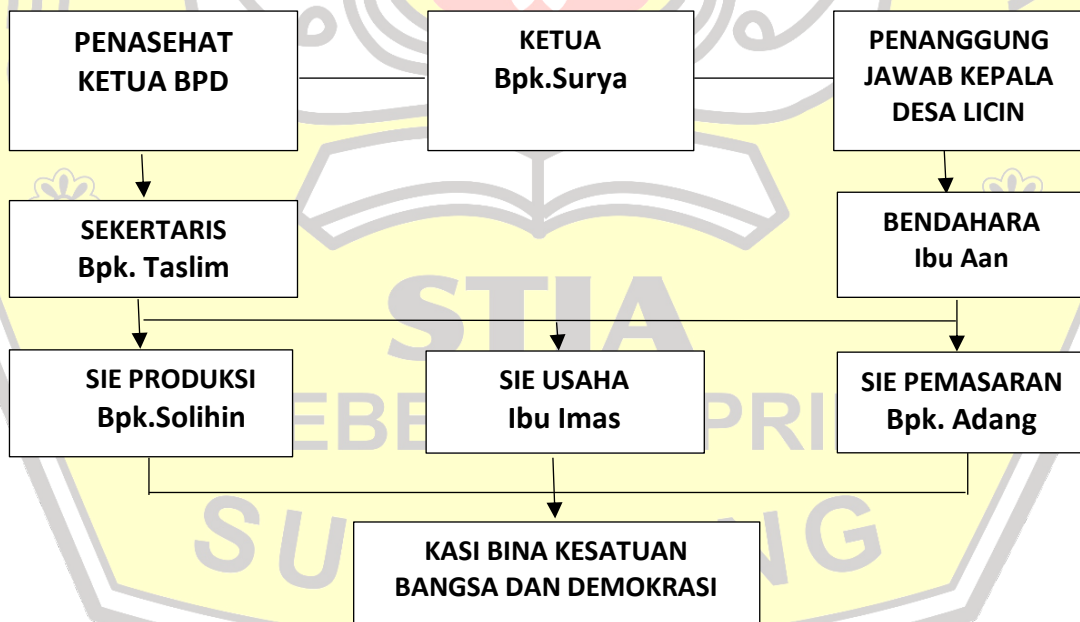
Revitalisasi kelembagaan pertanian dapat dilihat dari keputusan bupati no. 16 tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian terhadap gabungan kelompok tani melalui keputusan bupati tersebut, maka dibutuhkan dukungan kelompok tani yang kuat.

Pertanian di Kecamatan Cimalaka merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan perekonomian daerah. Penerapan Gabungan Kelompok Tani Khususnya di Desa Licin Kecamatan Cimalaka belum diterapkan dengan baik karena terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi seperti belum optimalnya monitoring yang dilakukan oleh pimpinan dalam pelaksanaan program gabungan kelompok tani. Hal ini dilihat dari kurangnya pengawasan langsung dari pimpinan kepada anggota kelompok. Pimpinan merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, keberhasilan Gapoktan akan sangat tergantung dari kepiawaian pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan Gapoktan yang kurang baik mengakibatkan terdapat kurangnya rasa tanggungjawab yang dimiliki tiap anggota kelompok. Dengan adanya kondisi tersebut terdapat beberapa pekerjaan yang tidak diselesaikan dengan tepat pada waktu yang ditentukan, terbatasnya sumber daya yang dimiliki, serta kurangnya kemampuan anggota kelompok.

Susunan Organisasi Gabungan Kelompok tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekertaris
- c. Bendahara
- d. Seksi Produksi
- e. Seksi Usaha
- f. Seksi Pemasaran
- g. Anggota

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana peraturan Kepala Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Bupati Nomor 22/2007/DS.X/2007 tentang susunan pengurus Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sebagaimana pada Gambar 1.1 berikut :



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang**

Sumber : Data Gabungan Kelompk Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang 2020

Berhubung dengan struktur Organisasi Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya struktur organisasi tersebut dapat memperlancar proses Implementasi Kebijakan Keputusan bupati tentang Sistem penyuluhan pertanian terhadap Gabungan kelompok tani, alasannya karena dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka akan memudahkan dalam pencapaian implementasi tentang system penyuluhan pertanian terhadap gapoktan tersebut. Struktur organisasi menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur organisasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkan dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Adapun keadaan anggota Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Ciamalaka Kabupaten Sumedang berdasarkan jenjang Pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Keadaan anggota Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

<b>NO.</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	<b>Sekolah Dasar (SD)</b>	<b>45</b>
<b>2.</b>	<b>Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b>	<b>72</b>
<b>3.</b>	<b>Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)</b>	<b>89</b>
<b>4.</b>	<b>Diploma III (D3)</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Strata I (SI)</b>	<b>1</b>
<b>6.</b>	<b>Strata II ( S2)</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Strata III (S3)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>		<b>207</b>

Sumber : profil Gapoktan Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten sumedang

Dalam membantu mempermudah kelancaran tugas pokok dan fungsi prasarana Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang telah dilengkapi sarana prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana Gedung, Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang memiliki Gedung kantor yang memadai untuk kelancaran aktivitas.

Adapun jenis sarana dan prasarana (asset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional meliputi ruang kerja, peralatan computer dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas fungsi Gabungan Kelompok Tani khususnya dalam fungsi teknis. Secara umum asset khususnya asset tetap maupun asset *intangible* atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk system aplikasi masih dalam keadaan baik. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang**

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi	
			Baik	Kurang baik
1.	Komputer	1 unit		
2.	Mesin Traktor	4 unit		
3.	Mesin Pemotong Rumput	4 unit	-	
4.	Mesin Penyemprot	4 unit		

Sumber : Profil Gapoktan Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang

Demikian kondisi sarana dan prasarana Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang mana masih terdapat

kekurangan sehingga terkadang proses pelaksanaan tugasnya terhambat menyebabkan anggota masih belum sepenuhnya mendapatkan kebutuhan yang diperlukan dalam bekerja

Berdasarkan pemaparan mengenai kondisi sarana dan prasarana di Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang bahwa kondisi sarana dan prasarana yang terbatas dapat menghambat implementasi program penyuluhan GAPOKTAN. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana agar dapat memperlancar proses implementasi.

Gabungan kelompok tani merupakan organisasi yang berada dibawah pengawasan Kantor Desa dan gabungan kelompok tani diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggotanya dalam mengembangkan agribisnis, peningkatan kelompok tani menjadi organisasi yang kuat dan mandiri yang dicirikan antara lain: adanya pertemuan atau rapat pengurus yang diselenggarakan secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif , Pertemuan / penyuluhan dilaksanakan oleh anggota setiap 1 bulan sekali yang mana dilaksanakan dikantor Desa Licin, namun satu tahun terakhir terhambat oleh adanya wabah yang membatasi untuk diselenggarakannya penyuluhan /rapat, untuk mengatasi hal tersebut sementara ketua dan pengurus memonitoring hal itu secara online keketua anggota untuk mengevaluasi kinerja seluruh anggota.

Adapun Rapat Anggota Tahunan (RAT) Gapoktan, Gapoktan Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang melakukan Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2020, tujuan RAT sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada anggota dalam menjalankan tugas Gapoktan selama periode satu tahun, yang dilaporkan dalam sebuah laporan serta untuk mengevaluasi dan menilai kinerja selama satu tahun kerja, serta pertanggungjawabn dana pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau disebut PUAP, dalam kegiatan ini dihadiri oleh Camat Desa Licin dan sekeretaris, Dinas Pertanian Kecamatan Cimalaka, Bapak Kepala Desa Licin serta Sekertaris Desa, dan peserta perwakilan anggota kelompok tani yang ada di Desa Licin

Dinas Pertanian mengapresiasi kegiatan ini yang dapat teselenggara karena sebagai kewajiban Gapoktan dalam setiap tahunnya, untuk melaporkan pertanggungjawaban kepada anggotanya, serta pelaporan perkembangan Dana PUAP yang dikelola oleh Gapoktan Desa Licin tepat pada sasaran dan meningkatkan, meminimalisir tunggakan para anggota. Karena kasus perguliran tunggakan sering terjadi serta untuk meningkatkan manajemen dalam hal administrasi.

Berdasarkan deskripsi diatas, fenomena yang terjadi saat ini merujuk pada belum baiknya Implementasi Program Gabungan Kelompok Tani Di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan indikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Gabungan Kelompok Tani yang tidak berjalan dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh anggota kelompok.

2. Belum optimalnya monitoring yang dilakukan oleh pimpinan dalam pelaksanaan program gabungan kelompok tani. Hal ini dilihat dari kurangnya pengawasan langsung dari pimpinan kepada anggota kelompok.
3. Kurangnya kemampuan anggota kelompok, hal ini berdampak pada penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :”IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN BUPATI NO 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DALAM GABUNGAN KELOMPOK TANI DI DESA LICIN KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG.”

#### **B. Fokus Pemasalahan**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan diatas, maka peneliti memfokuskan masalah dalam menemukan beberapa gejala yang merujuk pada rendahnya Implementasi Kebijakan keputusan Bupati No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan keputusan Bupati No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Kebijakan keputusan Bupati No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam

Gabungan Kelompok Tani Di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang?

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan keputusan Bupati No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Fenomena mengenai Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No. 16 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani merupakan fokus penelitian yang peneliti anggap menarik untuk diangkat, karena masalah Implementasi Gabungan Kelompok Tani merupakan masalah yang kompleks.

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan keputusan Bupati No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Kebijakan keputusan Bupati No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan keputusan Bupati No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah (kontribusi) bagi pengembangan konsep-konsep dan teori-teori Ilmu Administrasi Negara yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam suatu kebijakan publik dan perbaikan-perbaikan dalam hal implementasi.

2. Secara praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memecahkan masalah bagi obyek penelitian dan bagi semua pihak yang terlibat baik itu masyarakat, Desa Licin, Gabungan Kelompok Tani dalam hal yang berkaitan Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hakekat Administrasi Negara

Dalam administrasi negara sangat diperlukan administrasi untuk mengatur pentingnya perjalanan pemerintahan yang ada di dalamnya agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan negara tersebut. Bagi suatu negara yang berdemokrasi, administrasi negara ialah untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan rakyatnya. Beberapa keinginan yang ditetapkan oleh rakyat seperti keadilan, kesejahteraan, keamanan, ketertiban sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dengan begitu, para pelaksana administrasi negara ialah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada kepentingan rakyat.

Sebagaimana yang dikemukakan Dimock (dalam Iskandar, 2014: 17) bahwa:

Administrasi negara merupakan bagian administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa di susun, digerakan dan dikemudikan.

Administrasi negara juga merupakan bagian dari ilmu politik yang mempelajari ketentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh oleh kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi negara menghendaki dua macam syarat jika hendak dipahami.

Pertama, perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum dan kedua harus diakui bahwa banyak masalah-masalah administrasi negara timbul dalam suatu kerangka politik. Oleh sebab itu, ilmu administrasi negara tidak saja mempersoalkan apa yang dilakukan tetapi juga bagaimana melakukannya.

Atmosudirjo (dalam Syaffi'e, 2010:24) bahwa "Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan".

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Siagian (2014:7) berpendapat "Administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara".

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi negara merupakan suatu proses penyelenggaraan ketatanegaraan yang dilakukan dan di laksanakan oleh aparat negara dalam tujuannya untuk mencapai cita-cita dari negara tersebut.

### **1. Ruang Lingkup Administrasi Negara**

Henry (dalam Pasolong, 2008: 5) memberikan beberapa ruang lingkup administrasi negara yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas (selain perkembangan administrasi negara itu sendiri) sebagai berikut.

#### **a. Organisasi Publik**

Fahmi (2013: 1) menyatakan bahwa, "Organisasi publik merupakan suatu wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya".

Adapun Henry (dalam Pasolong, 2008: 5) menyebutkan bahwa, "organisasi publik yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi".

Robbins (dalam Fahmi,2013: 12) menyatakan bahwa:

Organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi,yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi publik merupakan suatu wadah yang di dalamnya terdapat kesatuan sosial atau manusia yang secara sadar saling bekerjasama dengan batasan yang telah diatur dalam peraturan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

#### b. Manajemen Publik

Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008: 93),”Manajemen publik diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggung jawab dan menjalankan suatu organisasi dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi”.

Sedangkan Overman (dalam Keban, 2008: 92) berpendapat bahwa, “Manajemen publik adalah sebuah penelitian interdisipliner dalam organisasi dan merupakan perpaduan dari perencanaan, prngorganisasian serta pengendalian fungsi manajemen”.

Menurut Henry (dalam Pasolong, 2008: 5) menyebutkan bahwa “Manajemen publik yang berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program, produktivitas,anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia”.

Sehingga dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan sistem yang mengatur mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh sumber daya manusia guna mencapai tujuan organisasi.

### c. Implementasi

Usman (2002: 20) mengemukakan definisi implementasi sebagai berikut:

Implementasi adalah satu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan serta adanya mekanisme dari suatu sistem. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas monoton belaka tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu.

Henry (dalam Pasolong, 2008:5) menyebutkan bahwa, “Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi dan etika birokrasi”.

Sedangkan Harsono (2002: 67) mengemukakan bahwa, “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan politik ke dalam administrasi.”

Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu proses dalam merealisasikan kebijakan atau program dalam suatu organisasi maupun instansi pemerintahan untuk mencapai kepentingan bersama.

Maka dari pemaparan ruang lingkup administrasi negara di atas dapat diketahui terdapat tiga ruang lingkup, yaitu organisasi publik, manajemen publik dan implementasi.

### **B. Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Sebagai Bagian Dari Kajian Administrasi Negara**

Pada hakikatnya keberhasilan suatu organisasi salah satunya yaitu dengan cara mengimplementasikan program dengan tepat dan sebaik mungkin serta

dengan adanya anggota kelompok yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan organisasi menjadi organisasi yang kuat dan mandiri, serta memiliki anggota yang memiliki semangat dalam bekerja.

Implementasi kebijakan menurut pendapat Griendle ( dalam Hariyoso, 2002:148) :

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas dan pilihan yang rumit karena mempunyai cakupan cakrawala politis dan administratif. Mempelajari masalah implementasi berarti berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program itu dirumuskan, yaitu peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu kepada masyarakat.

Webber (dalam Wahab, 1997:56) mengatakan bahwa :

Implementasi kebijakan dirumuskan secara pendek bahwa *to o implements* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Jika pandangan ini ditelaah, maka implementasi dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggungjawab atas sesuatu program berikut pelaksanaannya terhadap

kelompok-kelompok sasaran, tetapi perlu juga memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan, politik, sosial, ekonomi dengan secara langsung.

Implementasi menurut Grindele (Leo Agustino, 2008: 154-156) adalah:

Implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan (*Content of policy*), lingkungan kebijakan (*context of implementation*). Hal tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah letak kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Pertanian adalah sektor paling penting dalam pilar pembangunan bangsa ini, kondisi ini terbukti ketika hampir disetiap era pemerintahan Indonesia memunculkan gagasan dan implementasi kebijakan dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai bentuk output kebijakan pertanian. Pembangunan di sektor pertanian bukan hanya ranah pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian tetapi telah terdesentralisasi ke setiap kabupaten atau kota bahkan desa. Sektor pertanian menjadi salah satu potensi ideal untuk mendukung pembangunan nasional. Saat ini pemerintah desa diberikan kewenangan untuk membantu tugas pemerintah daerah. Oleh karena itu desa harus mengoptimalkan sektor pertanian.

Begitupun dengan implementasi gabungan kelompok tani untuk meningkatkan pemberdayaan petani dalam prespektif administrasi yang meliputi pembinaan, pemberian pinjaman modal, dan pemasaran hasil pertanian dan hasil

pemberdayaan. Gabungan kelompok tani adalah suatu usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanian dengan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi gabungan kelompok tani memiliki kaitan erat dengan administrasi negara karena implementasi merupakan salah satu ruang lingkup administrasi negara. Pelaksanaan administrasi negara membutuhkan implementasi kebijakan dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan adanya implementasi pelaksanaan administrasi negara dapat berjalan dengan semestinya. Karena sistem atau cara yang ditawarkan implementasi dapat memudahkan pelaksanaan administrasi negara. Serta untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan gabungan kelompok tani sangat penting bagi masyarakat khususnya petani dengan adanya sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yaitu menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan global.

### **1. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan

keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu dipikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi pengertian kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya.

Kebijakan adalah seperangkat sistem prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengawal pembuatan keputusan dan meraih hasil yang rasional. Kebijakan adalah tujuan dan diimplementasikan sebagai sebuah prosedur atau protokol

Menurut Friedrich (dalam Islamy (2009:17) kebijakan adalah :

A proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose.

Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

Pengertian berikutnya dikemukakan oleh Anderson (dalam Islamy, 2009:17) bahwa kebijakan itu adalah : *A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matter of concern.*

Serangkaian kegiatan yang mempunyai kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Raksasataya (dalam Islamy, 2009: 17) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang telah dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik strategi.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan itu berasal dari seseorang, sekelompok atau pemerintah yang di dalam kebijakan itu terdapat kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan pelaksanaannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Serta kebijakan sebagai penetapan oleh satu atau sekelompok orang yang mencapai suatu tujuan atau memecahkan masalah tertentu.

## **2. Kebijakan Publik**

Administrasi negara dewasa ini telah mempunyai arti lebih besar dari sekedar pengertian yang tradisional. Para ahli administrasi negara telah meletakkan fungsi perumusan kebijakan negara sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Oleh karena itu bidang kajian yang menjadi perhatian utama dalam Administrasi adalah kebijakan publik. Menurut Iskandar (2014:162) mengatakan bahwa :

Kebijakan publik sangat penting bagi administrasi negara, karena selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh, untuk mengatasi isu-isu masyarakat, kebijakan publik dapat pula digunakan untuk mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi pemerintah.

Dalam penggunaan istilah, para ahli ada yang menggunakan kata “kebijakan” dan ada yang menggunakan istilah “kebijaksanaan”. Untuk lebih

memahami kedua makna istilah itu Purwodarminta (1995:138) memberikan pengertian sebagai berikut :

Kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti pandai, mahir, sellu menggunakan akal budinya, petah lidah dan pandai bercakap-cakap. Dengan demikian secara harfiah, kebijakan berarti kepandaian atau kemahiran, sedangkan kata “kebijaksanaan” berasal dari kata bijaksana yang berarti selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), tajam fikiran dan ingat-ingat, cara pemimpin dan bertindak, dan kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain. Menurut Anderson (dalam Sunggono, 1994:22-23) kebijakan publik

adalah:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan yang atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu.
4. Kebijakan publik bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan publik dalam arti positif didasarkan atau selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoratif)

Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik. Tugas administrator publik bukan membuat kebijakan publik atas nama kepentingan publik tetapi benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

### **3. Proses Pembuat Kebijakan**

Proses Pembuatan kebijakan publik menurut Dunn (dalam Budi ,2007:32)

adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda (*Agenda Setting*) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan . jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

### C. Implementasi

#### 1. Pengertian implementasi

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapinya dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.

Implementasi menurut Gaffar (2009:295) merupakan :

Salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Pengertian implementasi dikemukakan Van Meter dan Horn (Dalam Wahab, 2008:65) sebagai berikut :

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Selanjutnya pendapat Mazamanian dan Sabatier (Wahab, 2008:65 ) menjelaskan bahwa :

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata alam masyarakat atau kejadian-kejadian.

Sejalan dengan pendapat yang diuraikan oleh ketiga ahli diatas Solichin Wahab (2008:65) berpendapat bahwa :

Proses implementsai kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi perilaku dari semua pihak yangterlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baikyang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effect*).

Dari penjelasan beberapa para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut baik dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hsail. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan

sebagai aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan atau di setujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam, Agustino (2006:196) menjelaskan bahwa :

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu; pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari terdapat perbedaan-perbedaan sehingga menelurkan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya dua pendekatan ini betolak-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Inti dari kedua pendekatan ini adalah sejauhmana tindakan parapelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan.

Berdasarkan rumusan implementasi kebijakan diatas, maka implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan atau aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi

sasaran program. Menurut Wahab (2008:205) mengemukakan pengertian implementasi sebagai berikut :

Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, pemerintah eksekutif dan dekrit presiden.

Selanjutnya Leo Agustino (2012:69) menjelaskan bahwa :

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Selanjutnya Leo Agustino (2012:76) mengatakan bahwa :

Hal yang perlu dicatat dari implementasi kebijakan adalah : merupakan suatu tahapan penting dalam keseluruhannya struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak”. Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan, kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

Menurut Udoji (dalam Wahab, 2004:59) mengatakan bahwa: “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih dari pada pembuatan kebijakan”.

Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, Iskandar (2005:206) mengemukakan bahwa :

Ada sejumlah alasan yang dapat diberikan mengapa implementasi kebijakan merupakan batu sandungan dalam mewujudkan efektivitas organisasi birokrasi, salah satunya adalah birokrasi pemerintah belum merupakan kesatuan yang efektif, efisien, dan berorientasi kepada tujuan.

Implementasi menurut Grindle (dalam Leo Agustino, 2006:154-156), :

Implementasi di pengaruhi oleh isi kebijakan (*Content of policy*), lingkungan kebijakan (*context of implementation*).hal tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah letak kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Selanjutnya menurut Metter (dalam Leo Agustino,2012:27) menyatakan bahwa :

Implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Implementasi menurut Metter (dalam Leo Agustino,2012:27) memiliki 6 dimensi dasar, yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengambil kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
2. Sumber daya. Keberhasilan implementasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia sumber daya finansial/uang/dana/anggaran, serta kewenangan, sarana dan prasarana menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

4. Sikap dan kecenderungan para pelaksana. intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.
5. Komunikasi antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana. implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.
6. Lingkungan ekonomi sosial politik. Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik seperti lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Dari Pembahasan tentang implementasi kebijakan publik diatas maka sesungguhnya berusaha untuk memahami, apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi kebijakan publik, kita seharusnya tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga administrasi publik yang bertanggungjawab atas suatu program berkat pelaksanaannya, akan tetapi juga mencermati berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dalam suatu program dari keluarnya suatu kebijakan publik.

Selanjutnya menurut Uduji (dalam Wahab (1997:59) mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih dari pada pembuat kebijakan”. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, Iskandar (2014:206) mengatakan ada sejumlah alasan yang dapat diberikan mengapa implementasi kebijakan merupakan batu sandungan dalam mewujudkan efektivitas organisasi birokrasi, salah satunya adalah birokrasi pemerintah belum merupakan kesatuan yang efektif, efisien, dan berorientasi kepada tujuan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai implementasi kebijakan publik sesungguhnya berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi kebijakan publik, kita seharusnya tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga administrasi publik yang bertanggungjawab atas suatu program berkat pelaksanannya, akan tetapi juga mencermati berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku yang terlibat dalam suatu program dari keluarnya suatu kebijakan publik.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino,2006:196) menjelaskan bahwa :

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu: pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari terdapat perbedaan-perbedaan sehingga mengeluarkan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya dua pendekatan ini bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka

analisis tentang studi implementasi. Inti dari kedua pendekatan ini adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (*administartor* dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan.

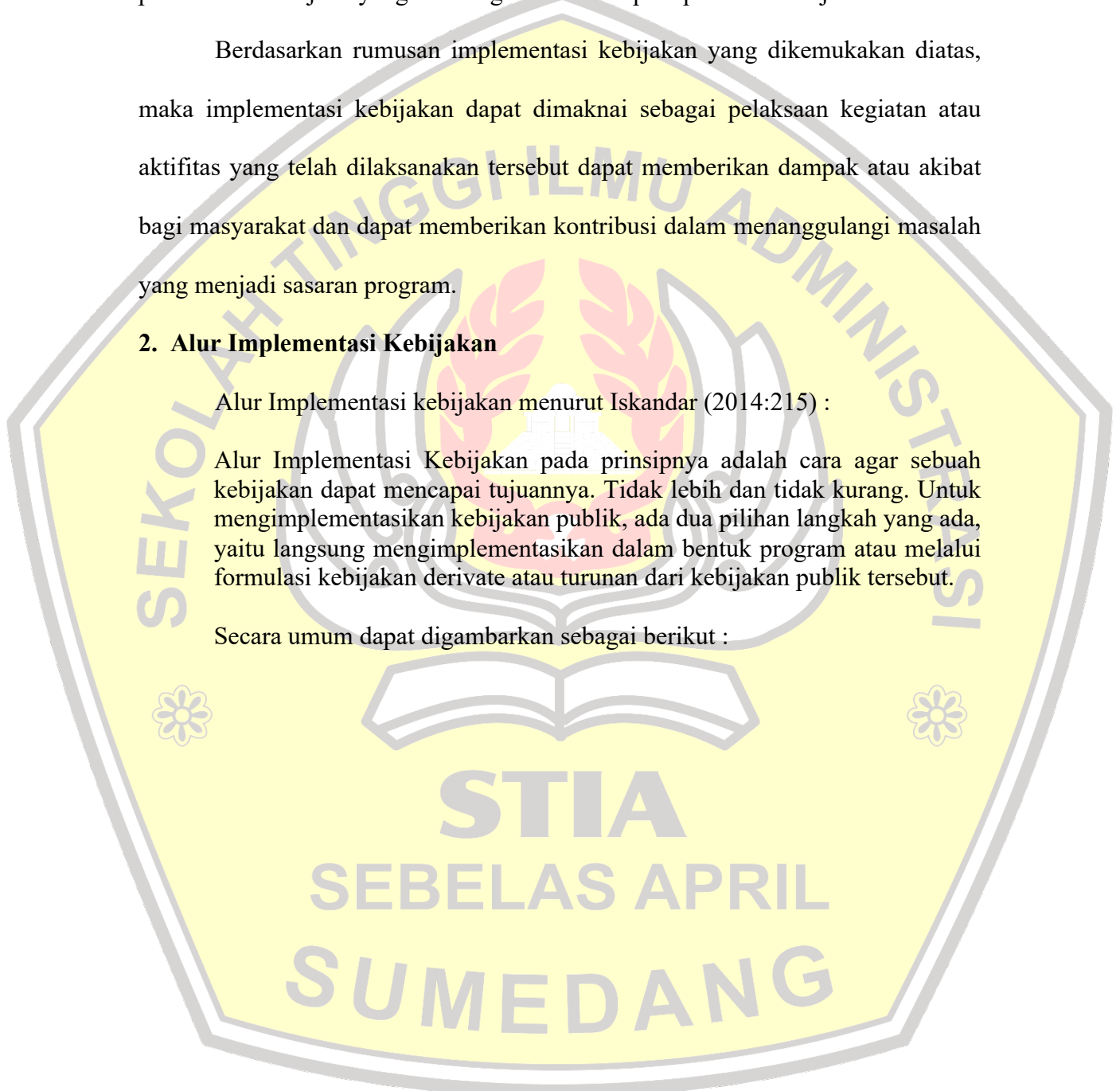
Berdasarkan rumusan implementasi kebijakan yang dikemukakan diatas, maka implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan atau aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak atau akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

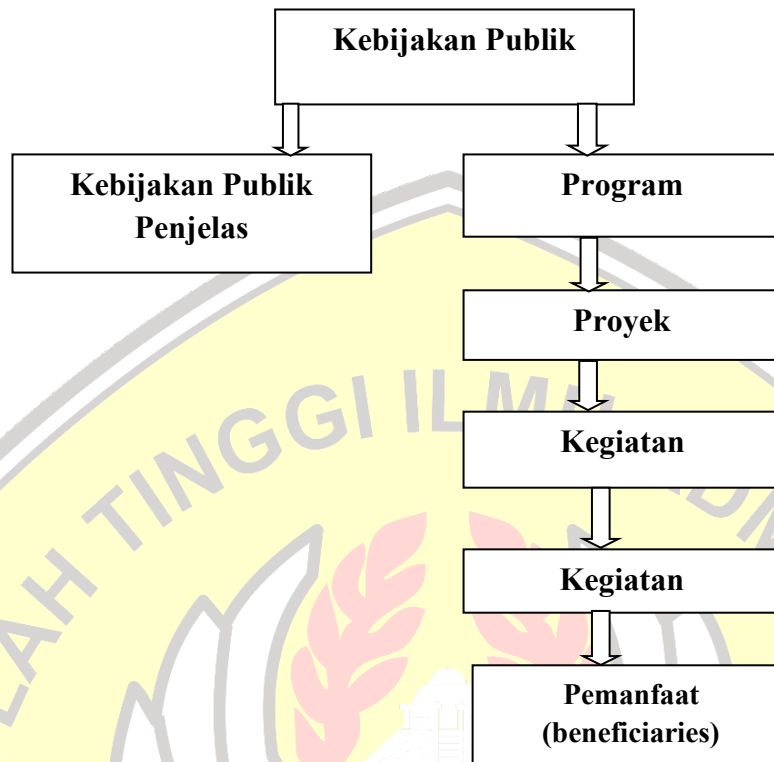
## 2. Alur Implementasi Kebijakan

Alur Implementasi kebijakan menurut Iskandar (2014:215) :

Alur Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

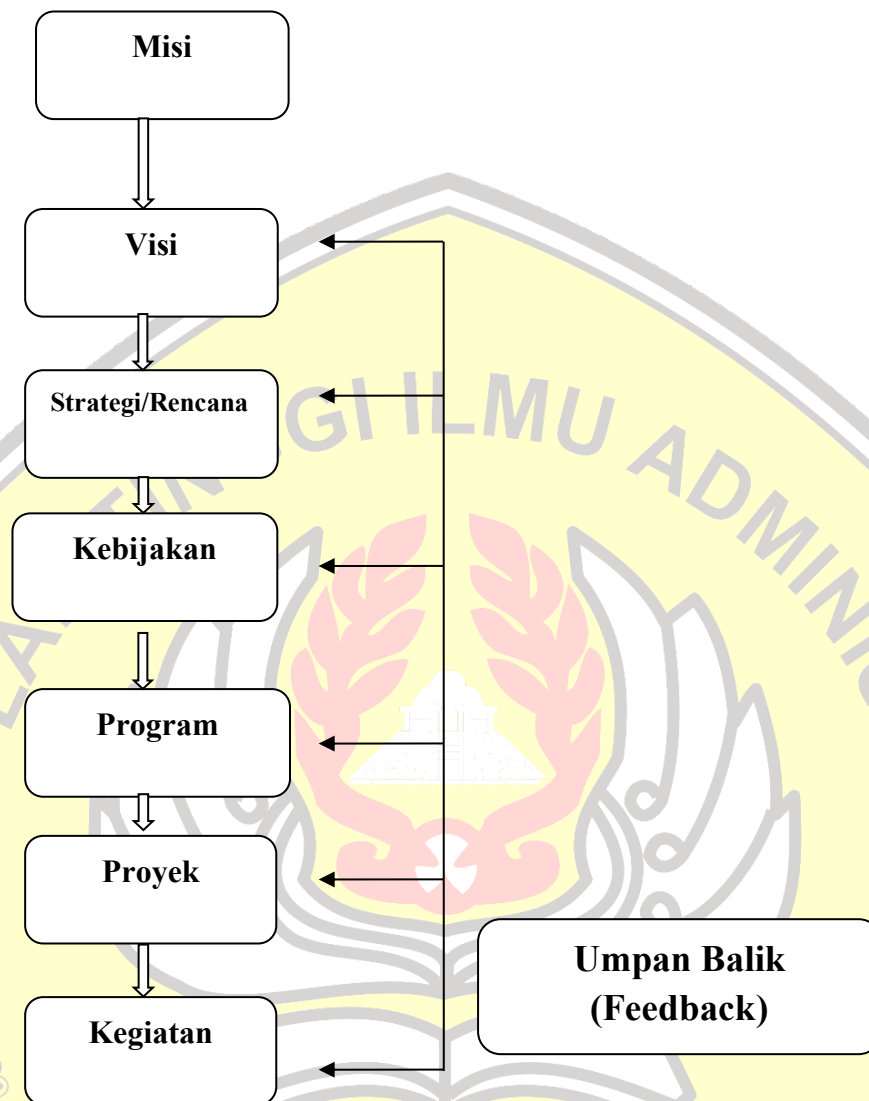
Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :





**Gambar 2.1**  
**Alur Implementasi Kebijakan menurut Iskandar (2014)**

Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar di atas, dapat dilihat dengan jelas, yaitu dari program ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Sebagaimana digambarkan berikut ini :



**Gambar 2.2**  
**Alur Implementasi Kebijakan menurut Iskandar (2014)**

Misi adalah yang pertama, karena melekat pada organisasi. Misi adalah *raison d'ere*, atau alasan mengapa organisasi hadir atau eksis. Misi adalah tujuan melekat setiap organisasi sampai organisasi ini bubar kelak. Misi organisasi memberikan acuan kepada pemimpin untuk merumuskan visi yang sesuai dengan kapasitas pemimpin tersebut untuk membuat *mission accomplished* melalui kapasitas dan keunggulan yang dimilikinya.

Visi adalah strategi atau rencana. Strategi adalah arah makro atau politik dari upaya pencapaian tujuan. Strategi ini dieksekusi dalam bentuk kebijakan-kebijakan, baik yang bersifat publik maupun non publik. Jadi kebijakan publik dapat dikatakan putusan politik terhadap pilihan atas strategi. Kebijakan dioprasionalkan dalam bentuk program-program yang berjalan parallel dengan itu, seperti pengangguran program. Program ditailkan dengan dalam proyek-proyek, dan implementasinya dalam bentuk produk baik berupa pelayanan maupun barang. Istilah produk juga sering diganti dengan kegiatan, namun sengaja tidak digunakan karena ada keluaran yang berupa *tangible product*, yaitu jasa, dan *tangible* yaitu produk.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

### 3. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Perencanaan suatu program kurang begitu penting dibandingkan dengan upaya-upaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang tepat. Suatu garis pembeda dapat kita antara merencanakan dan merencanakan untuk melakukan perubahan.

Tahap-tahap implementasi kebijakan dikemukakan oleh Wahab (1997:112) sebagaiberikut :

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.

2. Melaksanakan program, dengan mendaya gunakan struktur –struktur dan personalia dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasasn yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan dapat segera dilaksanakan.

Selanjutnya implementasi kebijakan publik merupakan suatu pemanfaatan strategis terhadap masalah-masalah publik dalam hal pemecahan suatu permasalahan tersebut perlu diupayakan suatu tahapan atau proses dalam pembuatan kebijakan publik, sebagaimana diungkap oleh Islamy 2009:102-106) bahwa tahapan-tahapan implementasi kebijakan adalah :

1. Bersifat *Self-executing* yang berarti bahwa dirumuskannya dan disahkannya sesuatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
2. Bersifat non *self-executing* berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Berdasarkan kesemua tahapan diatas maka dapat digunakan sesuai kondisi yang terjadi, misalnya kondisi butuhnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain dan suatu kebijakan haruslah diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai aspek agar tujuan pembuat kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat tercapai.

#### 4. Syarat-Syarat Implementasi Kebijakan

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut salah satu teori implementasi Hogwood dan Gun (dalam Solichin,1997:71-78)

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau intansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesempatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

### **5. Implementasi Program Gabungan Kelompok Tani**

Program gabungan kelompok tani adalah suatu usaha guna meningkatkan produktifitas pertanian dengan cara memanfaatkan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya. Gabungan kelompok tani juga merupakan organisasi yang berada dibawah pengawasan Kantor Desa dan gabungan kelompok tani diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggotanya dalam mengembangkan agribisnis, peningkatan kelompok tani menjadi organisasi yang kuat dan mandiri yang dicirikan antara lain ; Adanya pertemuan atau rapat pengurus yang diselenggarakan secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif. Gabungan kelompok tani memiliki fungsi yaitu ; merupakan satu kesatuan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar, penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida dan lain-lain) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan menurut peraturan perundang-undangan nomor 19 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa setiap lembaga, kelompok, atau organisasi yang menerima dana hibah dari pemerintah harus berbadan hukum. Kelompok tani bisa berbadan hukum setelah unit produksinya berkembang menjadi kelembagaan ekonomi petani berupa badan usaha milik petani (BUMP), begitupun dengan Gabungan Kelompok tani di Desa Licin yang sudah berbadan Hukum sesuai dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia Nomor AHU-0036427.AH.01.07 Tahun 2016 yang memberikan pengesahan badan hukum.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai lembaga ekonomi petani terdiri dari beberapa kelompok tani yang memiliki karakteristik tertentu, sehingga dengan adanya Gapoktan ini akan tercipta komunikasi yang efektif bagi petani. Organisasi dibentuk sebagai wadah bagi sekelompok individu alam mencapai tujuannya tergantung kepada sinergi atau kerjasama individu dan kelompok. Kelompok tani merupakan wadah utama bagi petani untuk dapat berkembang serta mengembangkan usaha taninya, sehingga peranan Gapoktan pada kelompok tani sangat dibutuhkan. Gabungan Kelompok Tani Desa Licin mengembangkan kelompok tani dilakukan beberapa sarana diantaranya dengan dilakukannya pemberian diklat pelatihan, penyuluhan keberlanjutan dari program Gapoktan Sendiri dilakukan dengan adanya pembinaan yang dilakukan melalui instruksi dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang.

Mewujudkan petani yang mempunyai kapasitas dibutuhkan pula implementasi Gapoktan yang efektif serta mampu memenuhi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh petani.

Dasar identifikasi Gapoktan:

1. Potensi wilayah perwakilan kelompok tani, payah : potensi kelompok tani, skala pengembangan komoditi unggulan, ada peluang untuk dikembangkan.
2. Organisasi dan manajemen : memiliki kepengurusan dimana pengurus dipilih secara demokratis dari perwakilan kelompok tani.

#### **6. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi**

Implementasi kebijakan mempunyai faktor penghambat yang dapat menggagalkan target dan sasarnya. Menurut Sunggono (1994:149:153), faktor penghambat implementasi kebijakan adalah:

1. Isi kebijakan
 

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samanya isi kebijakan maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan kekurangan-kekurangan yang sangat berarti, keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
2. Informasi
 

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplemenasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku juga terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

**7. Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi**

Implementasi kebijakan mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi hambatan implementasi. Menurut Sunggono (1994:149:153), faktor penghambat implementasi kebijakan adalah:

1. Isi kebijakan

Untuk memahami secara lebih mendalam mengenai isi kebijakan publik yang begitu kompleks dapat menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik dan pendekatan implementasi publik. Agar tidak terjadi timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia, maka diharuskannya memiliki pemahaman mengenai isi kebijakan, kejelasan informasi fasilitas, dukungan yang penuh dari pelaksana kebijakan, sarana dan prasarana yang memadai, serta adanya pembagian tugas yang jelas.

2. Informasi

Para pemegang peran diharapkan dapat terus menggali dan mengakses berbagai informasi yang implementasi dapat berjalan dengan semestinya.

3. Dukungan

Dukungan sangatlah penting dalam berbagai hal. Dukungan sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan karena Dukungan dari berbagai pihak seperti dukungan dari pemerintah dapat memudahkan implementasi kebijakan atau implementasi dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi juga sangat penting dalam implementasi karena pembagian potensi merupakan kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan nyata. potensi pada diri seseorang harus dikembangkan menjadi lebih baik dengan sarana dan prasarana yang tepat guna mencapai keberhasilan suatu implementasi.

#### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusunan penelitian profosal ini penulis terlebih dahulu menggunakan penelitian terdahulu yang berupa skripsi dengan judul yang peneliti ajukan, hal tersebut untuk mempermudah peneliti dalam menyusun dan mempertimbangkan penyusunan profosal. Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	Analisis Implementasi Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang (Universitas Sebelas April Sumedang)	Variabel Implementasi, jenis peneliiian kualitatif	Lokus penelitian yang berbeda	Implementasi program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, radan jaringan pengairan laiinya di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang sudah melaksanakan program sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan sudah melaksanakan arahan dari pemerintah yang diberikan oleh pimpinan. Tetapi tidak semua kelompok-kelompok yang terlibat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2.	Impelemtasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengatasan Kemisiskina n (Studi Penelitian Pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaa n Masyarakat Mandiri (PNPM) Di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan	Mengkaji dan meneliti tentang implementasi, jenis peneliiian kualitatif	Lokus penelitian yang berbeda	Strategi implementasi kebijakan dalam pengatasan kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarkat mandiri (PNPM) Di kecamatan Geger adalah dengan membuat perencanaan partisipatif. Hambatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengatsan kemiskinan melalui PNPM di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan adalah kurangnya sosialisasi dan informasi dari Satker Kabupaten (Bapedda dan Bapemmas) dalam

	(Universitas Muhammadiyah Malang)			<p>rangka pelaksanaan skema integrasi Perencanaan Pembangunan Reguler dengan PNPM mandiri perdesaan tahun 2011 kepada pelaku di tingkat kecamatan dan desa sehingga belum bisa terlaksana secara optimal. Selain itu berbagai program pembangunan maupun pemberdayaan belum bisa terlaksananya pelaksanaan skema integrasi perencanaan pembangunan regular dengan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 sekaligus rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program PNPM mandiri.</p>
3.	Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (Universitas Lampung Bandar Lampung)	Mengkaji dan meneliti tentang implementasi, jenis peneliiian kualitatif	Lokus penelitian yang berbeda	<p>Implementasi kebijakan program pendampingan di desa Bogorejo telah berjalan, namun masih ditemukan kendala-kendaa seperti kurang maksimalnya komunikasi, sumber daya manusia yang kurang memadai dan tidak sesuai bidangnya, pendamping desa tidak mendampingi satu desa, pendamping desa tidak permanen atau sistem kontrak. Diharapkan pemerintah melalui Kemendes dapat lebih intensif melakukan pelatihan kepada pendamping desa, memberikan setidaknya</p>

				dua sampai tiga tahun kontrak kepada pendamping desa, dan yang lebih penting pemerintah harus mengevaluasi kebijakan program pendamping desa.
--	--	--	--	---

## E. Kerangka Penelitian Dan Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

### 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir peneliti dalam penelitian. Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berpikir. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Analisis Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang tersebut dengan apa yang senyatanya terjadi di lapangan. Penulis berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Donal Van Matter (Agustino :2017) yang mengatakan bahwa implementasi mengandung beberapa dimensi yaitu: Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Dan Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi Sosial Politik.

Bagi sebuah implementasi untuk menjalankan kegiatan dari semua programnya dibutuhkan sumber daya manusia yang selalu siap dalam menghadapi berbagai tantangan dalam bekerja. Dengan demikian setiap organisasi seharusnya memiliki implementasi yang tinggi.

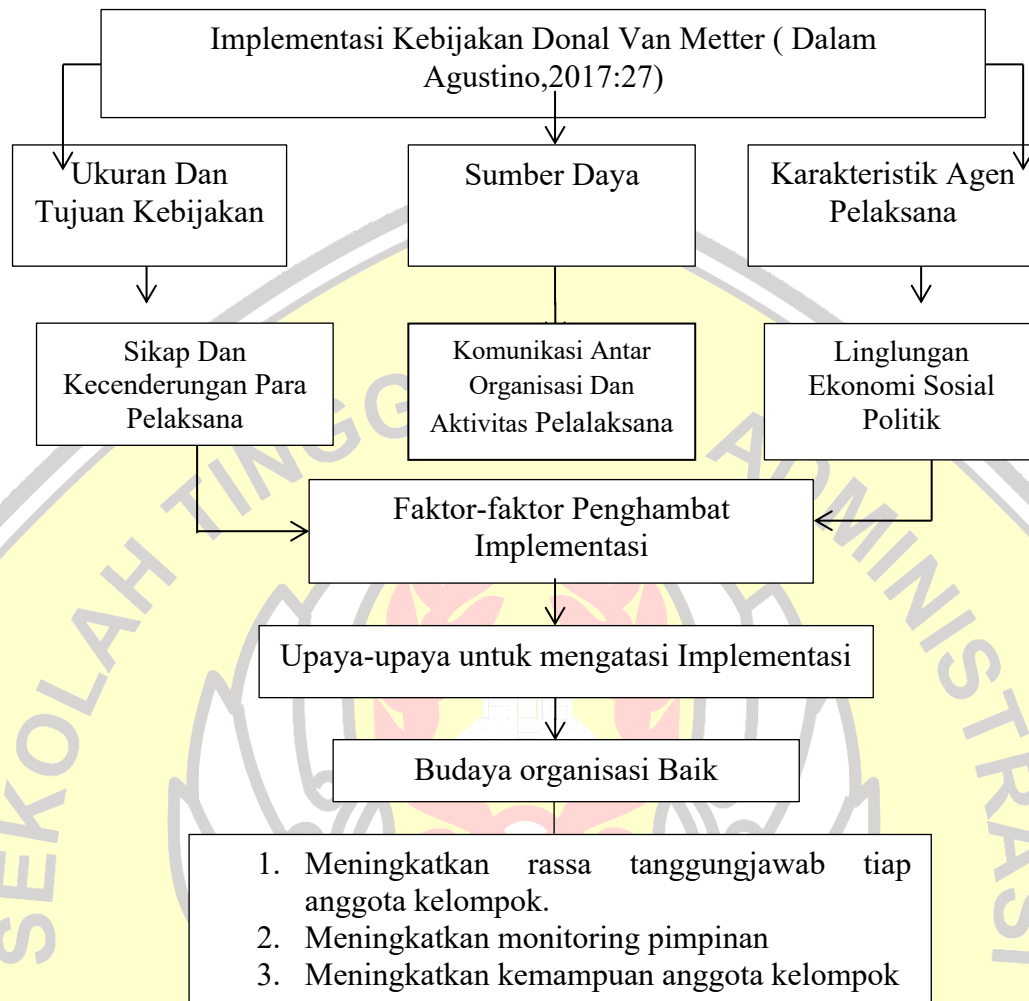
Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk undang-undang atas peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik yang bisa langsung dioprasinalkan antara lain keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas.

Pada kenyataannya sangat sulit untuk memiliki implementasi yang baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti isi kebijakan, informasi, dukungan, pembagian potensi. Akan tetapi, hambatan-hambatan tersebut tentu dapat dihadapi. Ada beberapa solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut sebagaimana yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Sehingga dari hambatan tersebut akan terselesaikan melalui beberapa solusi yang nantinya dapat menjadikan budaya organisasi yang kuat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi sangat dibutuhkan dalam menjalankan setiap tugas, pokok dan fungsi pegawai dalam bekerja.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyajikan kerangka pemikiran seperti pada gambar dibawah ini :



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran Analisis Implementasi Program Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang**

## 2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Dari sekian banyak ukuran atau dimensi yang telah dikemukakan sebelumnya tentang implementasi yang dikemukakan oleh keenam dimensi yang dikemukakan oleh Kebijakan Donal Van Metter (Dalam Agustino,2012:27) telah sesuai dengan topik yang di angkat dalam penelitian ini, yaitu tentang “Analisis Implementasi Program Gabungan Kelompok Tani Di Desa Licin Kecamatan

Cimalaka Kabupaten Sumedang”. Untuk pembahasan selanjutnya maka peneliti memberikan kisi-kisi pertanyaan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Kisi-kisi Instrumen Penelitian**

<b>Fokus Permasalahan</b>	<b>Fokus Teori</b>	<b>Kisi-kisi Pertanyaan</b>	<b>Item</b>
Implementasi Kebijakan Donal Van Metter (dalam Agustino,2012:27)	1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan	a. Sesuai dengan kemampuan pelaksana	1
		b. Sesuai dengan kemampuan masyarakat	2
	2. Sumber Daya	a. Jenis sumber daya yang dimiliki	3
		b. Kemampuan sumber daya	4
	3. Karakteristik Agen Pelaksana	a. Organisasi formal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan	5
		b. Organisasi Informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan	6
4. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana	a. Respon agen pelaksana dan masyarakat	7	
	b. Adanya sosialisasi tujuan yang jelas kepada masyarakat	8	
5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana	a. Adanya koordinasi antar pihak yang terlibat	9	
	b. Adanya komunikasi antar pihak yang terlibat dengan masyarakat	10	
6. Lingkungan Ekonomi Sosial Politik	a. Dukungan Lingkungan Ekonomi	11	
	b. Dukungan Lingkungan Sosial	12	
	c. Dukungan Lingkungan Politik	13	
Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Implementasi Sunggono (2014:77)	7. Isi Kebijakan	a. Pemahaman Isi Kebijakan	14
		b. Ketidakjelasan Maksud Dan Tujuan	15
	8. Informasi	a. Ketidakjelasan	16

Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Masalah Implementasi Sunggono (2014:77)		Informasi	17
		b. Fasilitas	17
	9. Dukungan	a. Kurangnya Dukungan Dari Pelaksana Kebijakan	18
		b. Sarana Prasarana Yang Belum Memadai	19
	10. Pembagian Potensi	c. Adanya Pembagian Tugas Yang Belum Jelas	20
	11. Isi Kebijakan	a. Pemahaman isi kebijakan	21
		b. Ketidakjelasan isi dan tujuan	22
	12. Informasi	c. Ketidakjelasan Informasi	23
	13. Dukungan	a. Kurangnya Dukungan Dari Pelaksana Kebijakan	24
		a. Sarana Dan Prasarana Yang Belum Memadai	25
14. Pembagian Potensi	b. Adanya Pembagian Tugas Yang Belum Jelas	26	

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif Subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan, dan berakhir dengan suatu “teori”.

Menurut Sugiyono (2014: 1) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah :

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (Dalam Moleong, 2012: 4) mengemukakan bahwa: “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

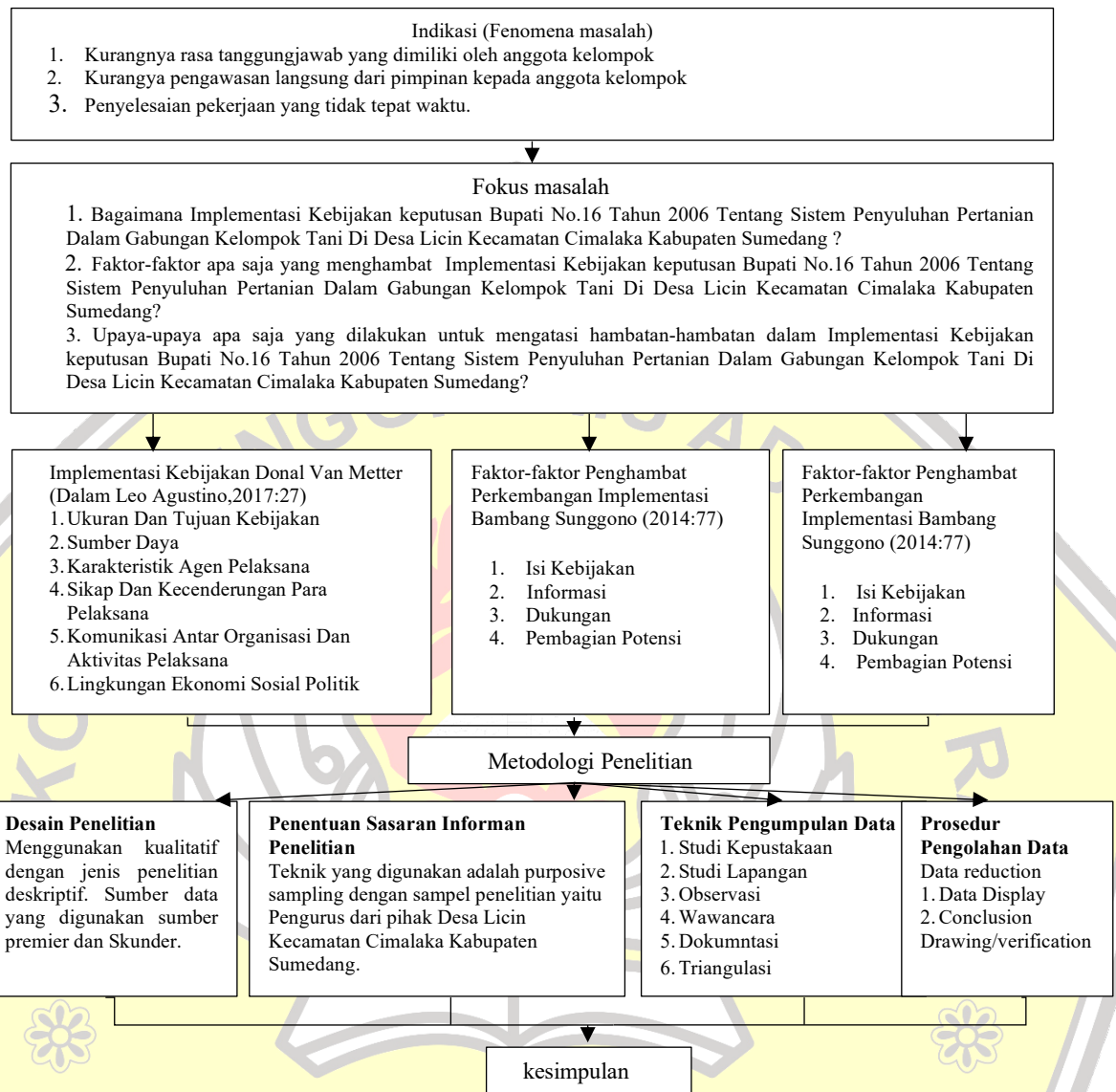
Metode kualitatif ini digunakan karena di anggap lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang dihaapi dilapangan

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2012: 8-13) memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut:

- a. Latar alamiah
- b. Manusia sebagai alat (*instrumen*)
- c. Metode kualitatif
- d. Analisis data secara induktif
- e. Teori dan dasar (*grounded theory*)
- f. Deskriptif
- g. Lebih mementingkan proses dari pada hasil
- h. Adanya “batas” yang ditentukan oleh fokus
- i. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
- j. Desain yang bersifat sementara
- k. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama

Maka, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian naturalistik atau metode penelitian kualitatif karena penilaiannya dilakukan pada kondisi yang alaiiah (*natural setting*) serta digunakan karena dianggap lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dilapangan.

Berdasarkan hal tersebut , maka dapat digambarkan Desain Penelitian di bawah ini yaitu sebagai berikut :



**GAMBAR 3.1**  
**DESAIN PENELITIAN**

## B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian

### 1. Penentuan Sasaran

Dalam melaksanakan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu berhadapan dengan obyek atau sasaran yang diteliti, baik berupa manusia, benda maupun aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian dimana suatu masalah dapat berupa keseluruhan karakteristik obyek penelitian yang disebut sebagai obyek penelitian atau sasaran penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, namun oleh Spradley yang dikutip Sugiyono (2013: 215) dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Objek dan informasi penelitian kualitatif menjelaskan objek penelitian yang menjadi fokus dan lokus penelitian ini adalah Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

Untuk menentukan informan kunci, peneliti menentukan kriteria sebagai berikut:

- a. Pihak dari Kantor Desa Licin yang mengetahui secara detail tentang segala kondisi yang ada di Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Memiliki banyak informasi yang berguna, berkaitan dengan tujuan penelitian.
- b. Bersedia menjadi informan

Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah pihak dari Kantor Desa Licin dan seluruh pengurus di Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ada 208 Orang

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Pengurus Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang**

No.	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	1
3.	Bendahara	1
4.	Seksi Produksi	1
5.	Seksi Usaha	1
6.	Seksi Pemasaran	1
7.	Penanggung Jawab	1
8.	Anggota	201
<b>Jumlah</b>		<b>208</b>

Sumber: Profil Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang

## 2. Informan Penelitian

Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat serta data diperoleh dari informan serta sampel. yang benar-benar memahami permasalahan dengan *argument* bahwa mereka mengetahui banyak mengenai fenomena yang terjadi dilapangan, sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan *Sampling Purposive*, menurut Sugiyono (2013:9) adalah: “*Sampling Purposive*” adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

No.	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	1
3.	Bendahara	1
4.	Seksi Produksi	1
5.	Seksi Usaha	1
6	Penanggung Jawab	1
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

Sumber: Penelitian, 2021

Peneliti mengambil sejumlah orang tersebut di atas berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan berkompeten dan bertanggung jawab mengenai proses Implementasi secara keseluruhan maupun sebagian tergantung tugas pokok, uraian tugas dan tingkat wewenang serta tanggung jawabnya. .

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden, yang dituangkan dalam pernyataan testruktur. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen yang menunjang pembahasan hasil dari penelitian ini dengan cara melakukan studi kepustakaan, dan studi lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Suatu upaya untuk memperoleh keterangan ilmiah dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku referensi, karya ilmiah, dokumen-dokumen, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan.

b. Studi Lapangan

1. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian, yaitu data tentang Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi berpartisipasi, yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari dengan pihak-pihak yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan informan yang ditentukan dalam penelitian ini. Adapun jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terstruktur, dimana apeneliti telah menyiapkan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

### 3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan memperhatikan dokumen-dokumen, seperti: tulisan, literatur, teori-teori, gambar, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan lain-lain.

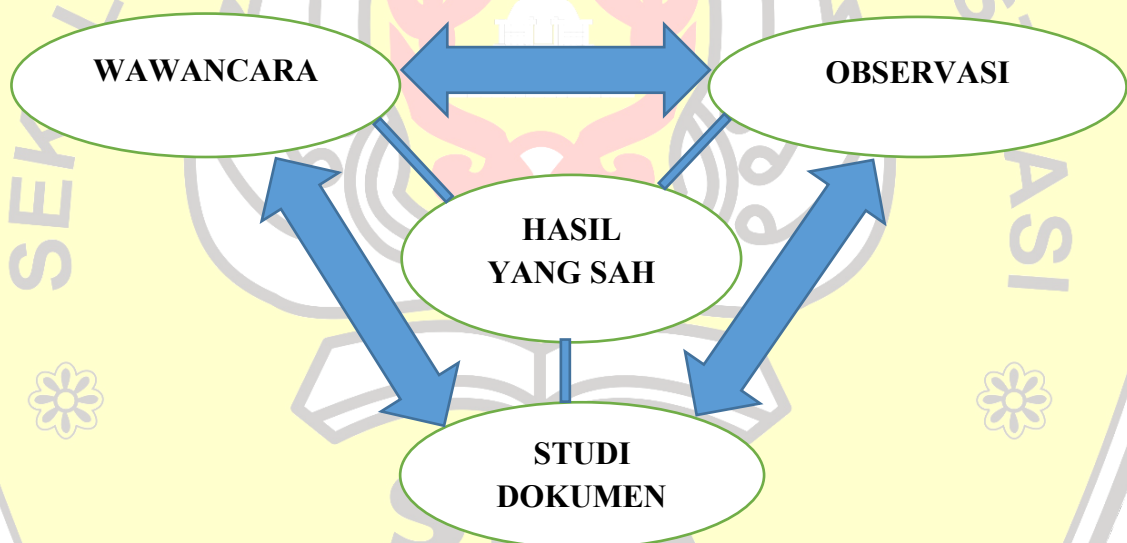
### 4. Triangulasi

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan jalan; 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) Membandingkan keadaan dan resfektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Pentingnya Triangulasi dalam teknik penelitian kualitatif adalah agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti

pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga memperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu triangulasi dalam kualitatif ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Maka dapat Digambarkan Desain gambar Triangulasi sebagai Berikut :



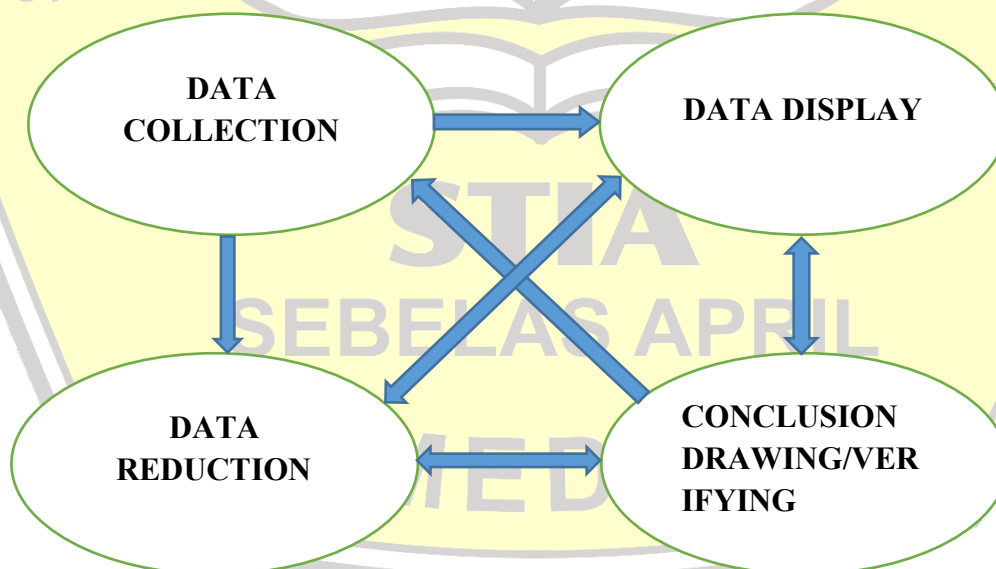
**Gambar 3.2 Analisa Data Triangulasi**

#### **D. Prosedur Pengolahan Data**

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknik analisis data Model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014: 91).

Adapun prosedur pengolahan data hasil penelitian sesuai dengan teknik analisis data Model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)  
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tepat dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
- b. *Data Display* (Penyajian Data)  
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan yang sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. *Conclusion drawing/verification*.  
Yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai temuan baru yang berupa deskripsi atau gambaran dari obyek yang sebelumnya masih samar-samar atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan atau verifikasi tersebut dapat berupa hubungan kausalitas atau interaktif, hipotesis, dan teori. Maka dapat Digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3.3 Analisa Data Model Miles dan Huberman**

### E. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Adapun jadwal waktu pelaksanaan selama penelitian dan penyusunan skripsi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agust 2021
1	<b>Tahap Persiapan</b>										
	a. Studi Kepustakaan										
	b. Observasi Awal										
	c. Pengajuan Judul										
	d. Pembuatan Proposal										
	e. Seminar Proposal										
2	f. Perbaikan hasil seminar proposal										
	<b>Tahap Pelaksanaan dan Penyusunan</b>										
	a. Pengumpulan Data										
	b. Pengolahan Data										
3	c. Penyusunan Skripsi										
	<b>Tahap Pengujian</b>										
	a. Sidang Skripsi										
	b. Perbaikan Sidang Skripsi										
	c. Publikasi										

**STIA**  
**SEBELAS APRIL**  
**SUMEDANG**

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dalam penerapannya dikategorikan Belum Baik, hal ini bisa dilihat dari kurangnya kemampuan pelaksana dan masyarakat sudah dilakukan. Dan jenis sumber daya dan kemampuan sumber daya di Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sudah sangat jelas. Serta pola hubungan yang dibangun di GAPOKTAN Belum baik, pola hubungan yang dibangun adalah dari atas kebawah. Masih terdapat terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya peralatan serta adanya peralatan yang sudah tidak layak pakai yang dapat menghambat pengelolaan pertanian. Juga masih terdapat kurangnya rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh anggota kelompok, Belum optimalnya monitoring yang dilakukan oleh pimpinan dalam pelaksanaan program gabungan kelompok tani.
2. Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Desa Licin

Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Adapun faktor-faktor yang menghambat Implementasi Program Gabungan Kelompok Tani adalah sebagai berikut yakni dalam penyampaian informasi atau program-program GAPOKTAN selalu ada ketidakjelasan informasi yang diterima hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni belum optimalnya monitoring yang dilakukan oleh pimpinan dalam pelaksanaan program gabungan kelompok tani, serta kurangnya pemahaman yang dimiliki anggota kelompok maupun para petani yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan informasi. Serta belum lengkapnya sarana prasarana yang dimiliki seperti tidak adanya kendaraan operasional GAPOKTAN. Namun masih terdapat beberapa anggota yang kurang bertanggungjawab dalam bekerja yang tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta kurangnya pemahaman yang dimiliki anggota kelompok terhadap tugas yang diberikan.

3. Upaya untuk memperkuat Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No.16

Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, yakni dengan cara untuk mengatasi ketidakjelasan maksud dan tujuan dengan cara bermusyawarah mengumpulkan aspirasi dari setiap anggota, serta memberikan arahan secara baik-baik. Di cari inti permasalahannya lalu ditentukan solusinya, dan untuk upaya mengatasi hambatan informasi terkait dengan implementasi kebijakan disalurkan dengan cepat dan tepat. Serta menanyakan langsung kepada setiap anggota apakah ada permasalahan atau ketidakjelasan yang dihadapi ketika sedang diadakannya pertemuan

mingguan atau dilalukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada agar dalam penyampaian informasi bisa dilakukan secara cepat dan jelas, untuk mengatasi kurangnya dukungan dengan memberikan arahan serta dengan mengadakan pembinaan maupun sosialisai terhadap setiap pelaksana kebijakan agar lebih semangat dalam bekerja demi keberhasilan organisasi itu sendiri serta demi mensejahterakan masyarakat Desa Licin. Serta untuk dukungan sarana dan prasarana dengan cara mengajukan langsung ke pusat oleh para pengurus GAPOKTAN apa saja yang dibutuhkan oleh GAPOKTAN Desa Licin tersebut dalam kegiatan GAPOKTAN. Di ajukan dengan cara dibuatkan profosal pengajuan. Serta untuk mengatasi pembagian tugas yang belum jelas yaitu dengan cara pengurus dan anggota mengadakan forum rapat. Serta pembagian potensi pada GAPOKTAN Desa Licin harus dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dan dilakukan sesuai bidang keahlian yang dimiliki.

## **B. Saran**

Pada akhir penulisan peneliti menuliskan beberapa saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, yang sekiranya dianggap perlu untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan. Berikut ini beberapa saran:

1. Diharapkan dilakukannya peningkatan sumber daya seperti sarana dan prasarana untuk memudahkan berbagai kegiatan pekerjaan yang terkait

langsung dalam Implementasi Program Gabungan Kelompok Tani Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

2. Selanjutnya peneliti merekomendasikan adanya peningkatan ukuran dan tujuan seperti lebih meningkatkan monitoring yang dilakukan oleh ketua serta lebih meningkatkan rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh anggota GAPOKTAN agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Diharapkan lebih memperhatikan kejelasan informasi seperti lebih memperhatikan koordinasi dan komunikasi agar memudahkan teresalisasinya kebijakan ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU:

Abdul, Wahab, Solichin.1997. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

\_\_\_\_\_ 2008. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara.

Agustino, Leo.2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter Van Horn ; The Poolicy Implementation*. Bandung : Mandar Maju.

\_\_\_\_\_ 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Kepemimpinan Teori Dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.

Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harsono, Hanafiah. 2002. *Implementasi Kebijakan Dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hariyoso, S. 2002. *Pembaruan Birokrasi Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Peradaban.

Iskandar. 2014. *Selekta Administrasi Negara*. Bandung : Puspaga

Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Keban, T Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Kosep Teori Dan Isu*.Yogyakarta: Gaver Media.

Nugraha, D. S., Setiawan, A. ., Agningsih, D. P. ., Aprilianti, D. N. ., Sutisna, E. ., & Yuliani, L. . (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 49-59. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/52>

Pasolong. Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Purwodarminta,WJS. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang.1994. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Karya Unipress.
- Syafii'e, Inu, Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Yogyakarta: Bintang Pustaka.
- Wahab,Solichin, Abdul.1997. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik.Yogyakarta : Media Pressindo*.
- \_\_\_\_\_ 2006. *Kebijakan Publik: Teori : Dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.





## **DOKUMEN-DOKUMEN**

1. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0036427.AH.01.07. tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum perkumpulan kelompok tani Desa Licin.
2. Keputusan Bupati No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian
3. Peraturan Kepala Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Nomor :22/2007/DS.X.2007.

